

KEPENTINGAN TURKI DALAM INTERVENSI MILITER DI LIBYA TAHUN 2020

Muhammad Ade Nopryannur¹

Abstrack: *The reason behind The Turkish Government to intervene in Libya was because of its interest in implementing the blue homeland doctrine, which is an expansionary doctrine that aims to control a wider territorial area and supremacy of the Turkish armed forces in the surrounding area. In addition, Turkish interest of natural resources wants to obtain considering the Eastern Mediterranean region is an area rich in energy resources. Also is Turkey's economic interest in meeting the growing demand for domestic energy resources within the country every year.*

Keyword : *Libyan War, Turkish-Libyan MoU, Turkish Military Intervention*

Pendahuluan

Dengan adanya gerakan revolusi Arab Spring yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah, Libya menjadi salah satu yang mengalami revolusi tersebut. Dengan runtuhnya rezim pemerintahan Muammar Khadafi yang telah memimpin Libya selama 42 tahun. Pasca berakhirnya pemerintahan Muammar Khadafi, Libya terbagi menjadi dua faksi kekuasaan yaitu pemerintah sah yang diakui oleh PBB *Government of National Accord* (GNA) dipimpin oleh Perdana Menteri Fayeze Al Serraj dan *Libyan National Army* (LNA) sebagai kubu oposisi yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar dan didukung penuh oleh Parlemen Libya.

Setelah revolusi 2011, Pemerintahan di Libya sendiri beberapa kali berganti nama, dimulai dengan *National Transition Council* (NTC) yang mengambil alih kursi pemerintahan sah Libya setelah lengsernya Khadafi. Dilanjutkan pada tahun 2012, Libya mengadakan pemilihan umum untuk memilih parlemen Libya, dan menghasilkan pemerintahan yang bernama *General National Congress* (GNC) yang memiliki masa tugas selama 18 bulan dan bertugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk Libya. Lalu pada 17 Desember 2015, pihak-pihak yang terlibat konflik menyepakati Perjanjian Politik Libya di kota Skhirat, Maroko, yang mendefinisikan pendirian GNA. Pada Februari 2017, pertemuan antara pemimpin LNA, Jenderal Khalifa Haftar dan Perdana menteri GNA, Fayeze al-Sarraj di adakan di Kairo, Mesir. Pertemuan ini mendapat desakan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: m.adenopryannur@gmail.com

dari Mesir dan Rusia, namun tetap mendapatkan hasil yang nihil dan tidak mencapai kesepakatan. LNA Libya kemudian menarik dukungannya terhadap GNA, dan memilih untuk mendirikan pemerintahannya di Tobruk. (*Libya Proactive Local Leaders*)

Selama proses negosiasi perdamaian terjadi, tidak sedikit konflik bersenjata terjadi di Libya. Dimulai pada Mei 2014, ketika LNA melancarkan *Operation Dignity* di kota Benghazi dan Tripoli hingga berhasil menguasai bandara Internasional Tripoli. (Perang Sipil Libya, Pasukan Jenderal Haftar Rebut Kamp Militer) Operasi balasan dilakukan oleh GNA Libya dengan sandi *Operation Dawn* sebagai perlawanan terhadap kelompok LNA dan akhirnya dapat kembali merebut bandara Tripoli dari kuasa oposisinya. Pada April 2019, kelompok LNA melancarkan serangan secara mendadak di Libya barat dan terus bergerak ke arah kota Tripoli. Melihat posisi GNA Libya yang semakin tersudut di Tripoli membuat Menteri Dalam Negeri GNA Libya, Fathi Bashaga, mengatakan dalam konferensi pers pada bulan April 2019 yang ditujukan kepada Pemerintah Turki, bahwa Libya secara formal meminta bantuan militer kepada Turki guna menghadapi pasukan pemberontak Jenderal Haftar. (*Libya Makes Formal Request for Turkish Military Support*). Pada 27 November 2019 Turki dan GNA Libya berhasil meratifikasi dua buah MoU yang berisikan tentang kesepakatan kerjasama keamanan dan militer juga kesepakatan tentang pembagian zona ekonomi eksklusif.

Pada 5 Januari 2020, Presiden Erdogan mengkonfirmasi bahwa Turki mulai mengirimkan pasukannya ke Libya secara bertahap, yang bertugas bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjaga keamanan dan menjamin berlakunya gencatan senjata. Dukungan Turki terhadap Libya umumnya dukungan operasional berupa perlengkapan senjata, pesawat tempur F-16, kendaraan lapis baja, kendaraan udara tanpa awak, kapal angkatan laut, serta instruktur militer untuk melatih pasukan GNA Libya. Menurut data yang dirilis oleh Pentagon, pada dua bulan pertama operasi militer Turki di Libya, Turki mengirim sekitar 3.800 tentara bayaran Suriah dengan imbalan menjadi warga negara Turki. Sebagai bentuk dukungan yang signifikan, Turki juga terlibat dalam *Operation Peace Storm*, dengan mengirimkan drone bersenjata dan menargetkan pusat komando LNA dan intelejen mereka yang bekerja dengan menggagalkan sistem pertahanan udara LNA. (*Peace Storm: turkey tries to turn the table in Libya*)

Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, dalam bukunya yang berjudul *The International Relations Dictionary* menjelaskan bahwa kepentingan nasional suatu negara adalah kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik dan ekonomi. (Jack C. Plano and Ray Olton, 1988)

Disamping itu Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya ada 5 kategori umum yang disebut Jack C. Plano sebagai berikut :

1. *Self Preservation* yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri, tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki power besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan.
2. *Independence* yang berarti mandiri, kedaulatan suatu negara untuk mengatur rumah tangga negara baik kedalam maupun keluar, militer dan ekonomi tanpa campur tangan dan tunduk kepada negara lain tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain agar negara tersebut tidak dijajah atau tunduk kepada negara lainnya.
3. *Military Security*, keamanan suatu negara dinilai dengan kekuatan militer untuk mempertahankan atau menjaga keamanan teritorial dari kekuatan militer negara lain maupun kelompok separatis, tujuannya untuk menjaga negaranya dari kekuatan militer negara lain atau sebagai antisipasi dari gangguan militer negara lainnya.
4. *Territory Integrity*, yaitu kepentingan nasional untuk mengamankan daerah teritorinya dan sumber daya yang berada dalam daerah teritori sebuah negara, tujuannya untuk mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan.
5. *Economic Well Being*, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tujuannya untuk memperoleh cadangan devisa negara lain, misalnya minyak dan gas untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri.

2. Konsep Intervensi

Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara kedua pihak (orang, golongan atau negara). Dalam hal ini intervensi dapat diartikan sebagai tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Lauterpacht, memberikan definisi intervensi sebagai campur tangan secara diktaktor oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah kondisi nyata di negara tersebut. (Huala Adolf, 2015)

Lebih jauh J. G. Starke menyatakan bahwa intervensi dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Intervensi internal, yaitu campur tangan negara lain terhadap sengketa yang terjadi di dalam negeri suatu negara.

- 2) Intervensi eksternal, yaitu campur tangan suatu negara atas sengketa yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain.
- 3) Intervensi punitif adalah campur tangan suatu negara dalam bentuk tindakan membalas tanpa berperang akibat kerugian yang ditimbulkan negara lain.

Pada Pasal 37 Piagam PBB, intervensi militer dapat dilakukan jika membahayakan pemeliharaan perdamaian dan perdamaian internasional. Pasal 51 Piagam PBB hanya mengizinkan penggunaan peralatan militer dalam rangka membela diri apabila suatu negara benar-benar dalam keadaan diserang. Menurut hukum internasional, intervensi dapat dibenarkan secara hukum apabila.

- 1) Jika negara yang mengintervensi telah diberikan hak oleh perjanjian
- 2) Jika suatu negara melanggar perjanjian untuk penentuan kebijakan bersama dengan bertindak secara sepihak
- 3) Jika intervensi diperlukan untuk melindungi warga negara suatu negara;
- 4) Jika diperlukan untuk pertahanan diri
- 5) Jika negara melanggar hukum internasional. Intervensi juga dibenarkan oleh perserikatan bangsa-bangsa ketika melibatkan tindakan kolektif oleh masyarakat internasional terhadap negara yang mengancam perdamaian atau melakukan suatu tindakan agresi.
- 6) Jika suatu tindakan dilakukan atas permintaan yang sungguh dan tegas (*genuine and explicit*) dari pemerintah yang sah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu penelitian yang berupaya menganalisis dan menggambarkan suatu fenomena terjadi. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, media massa, akses internet dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data bersifat studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif yakni dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil dikumpulkan, kemudian menyajikan hasil penelitian menggunakan teori sebagai dasar penting dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konflik di Libya

Pada perang sipil kedua di Libya yang dimulai pada tahun 2014, terjadi antara *Government of National Accord* dan pemberontak *Libyan National Army* pimpinan Jenderal Khalifa Haftar yang didukung penuh oleh parlemen Libya.. Dalam konflik bersenjata ini peta politis Libya terpecah menjadi dua poros, yaitu kelompok GNA yang terpusat di kota Tripoli didukung oleh Turki dan Qatar lalu kelompok LNA

yang berbasis di kota Tobruk dan di dukung oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Prancis.

Konflik ini dimulai pada tahun 2014 dan dilatarbelakangi karena ketidakpuasan kelompok LNA terhadap GNC yang saat itu memenangkan suara terbanyak Pemilu 2012. GNC sendiri terdiri dari dua kelompok politik besar, yaitu *National Forces Alliance* dan *Justice and Construction Party*. Dua kelompok ini mengalami perpecahan dan gagal mencapai kesepakatan politik. Ketidaksepakatan tentang Undang-undang isolasi politik dan situasi keamanan yang tidak stabil membuat GNC gagal untuk dapat memberikan kemajuan dan mengadakan pemilihan umum baru ketika masa kerjanya berakhir pada Januari 2014.

Pada Agustus 2014, Kementerian Kesehatan Libya mengumumkan bahwa banyak pertempuran-pertempuran besar terjadi di Tripoli dan Benghazi yang mengakibatkan setidaknya 214 orang meninggal dunia dan 981 orang luka-luka (*214 Deaths and 981 Injuries in recent clash up to 30 July min of Health*). Hingga akhirnya Parlemen Libya mengeluarkan Undang-undang untuk melucuti dan membubarkan semua kelompok bersenjata dan milisi yang dibentuk setelah Revolusi 2011. Dari 104 perwakilan yang hadir, 102 orang mendukung mosi tersebut. Namun, parlemen gagal untuk meratifikasi UU tersebut karena gagal dalam menyepakati susunan kata dalam UU tersebut. Akhirnya kelompok LNA melancarkan serangan militer dalam skala besar terhadap LNA pada Mei 2014, dengan sebutan sandi *Operation Dignity*.

Konflik pecah ketika kelompok pimpinan Jenderal Khalifa Haftar menyerang unit-unit *Martyrs Brigade, Brigade No.1, dan Libyan Shield* di Benghazi (Haftar Launches Benghazi Attack on Islamist). Pada Juli 2014, kelompok GNC melancarkan serangan dengan sandi *Operation Dawn* sebagai usaha untuk perlawanan dan upaya untuk merebut kembali kota-kota penting di Libya. Dengan adanya operasi balasan tersebut, GNC akhirnya dapat kembali menguasai Bandara Internasional Tripoli yang sempat dikuasai oleh kelompok LNA. Konflik yang terjadi terus meluas dan terjadi di kota-kota besar seperti Misrata, Kikla, Fezza, dan Zuwara.

Pada 2015, pihak-pihak yang terlibat konflik mengadakan pertemuan di kota Skhirat, Maroko, mereka menyepakati pembentukan *Government of National Accord* (GNA) sebagai pemerintah Libya yang sah dan didukung oleh PBB. Dengan adanya GNA, konflik yang terjadi di Libya tidak kunjung usai, dan masih terjadi konflik bersenjata yang berkelanjutan. Pada 12 Mei 2016, pertempuran pecah di kota Sirte dengan nama "*Al Bunyan Al-Marsoos*". Pertempuran lanjutan kembali terjadi pada 21 Juni 2016 antara Pemerintah GNA dan pasukan LNA, menyebabkan 36 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka. Hingga pada Desember 2016, pertempuran di kota Sirte berakhir dengan kemenangan pihak GNA dan berhasil mengusir para kelompok LNA. Pada 30 Juli 2017, pertempuran terjadi di kota Benghazi yang terjadi selama tiga tahun akhirnya berakhir dengan keberhasilan kelompok LNA menguasai kota tersebut. Pada Desember 2017, dengan banyaknya pertempuran yang terjadi Jenderal Khalifa Haftar menyatakan

bahwa apa yang mereka sepakati sebagai Perjanjian Skhirat batal, dan mengancam akan mengklaim kursi kepresidenan jika tidak ada pemilihan. (Warlord Khalifa Haftar Theattens Claims Presidency id Election Fails)

Pada Agustus 2018, kelompok LNA terus menekan pemerintah GNA dan memulai penyerangan ke ibukota Tripoli, hingga 27 Agustus 2018 pertempuran pecah antara berbagai milisi. Pertempuran ini berakhir pada 25 September 2018 setelah pihak-pihak yang terlibat konflik sepakat untuk gencatan senjata. Pada tahun 2019, LNA memulai serangan ke selatan Libya untuk mengamankan ladang minyak. Pada 3 April 2018, LNA melancarkan serangan mendadak ke Libya barat dan terus mengarah ke pusat kota Tripoli. Pemerintah GNA yang berbasis di Tripoli bereaksi terhadap serangan tersebut dengan mengularkan perintah untuk bersiaga segera. LNA terus bergerak menuju beberapa arah dan mencapai pinggiran kota Tripoli.

Dalam melakukan penyerangan ini LNA banyak mendapatkan dukungan militer dari beberapa negara seperti Rusia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kemudian LNA mengumumkan bahwa Libya barat sebagai wilayah larangan terbang dan mulai menyerang ke target GNA di Bab al-Azizia. Pertempuran kemudian berlanjut di dekat Bandara Internasional Tripoli hingga menyebabkan bandara ditutup. Hingga 11 April 2019 GNA telah berhasil merebut kembali kota Wadie Alrabie, Jembatan 27, dan Bandara Internasional Tripoli. (*National Accord Government Regains Controls of Four Sites in Tripoli, Haftar Promises Surprise*)

Dengan pasukan militer LNA yang semakin menyudutkan GNA Libya di kota Tripoli, GNA Libya kemudian memutuskan untuk meminta bantuan militer kepada Turki, yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri GNA Libya, Fathi Bashagaa melalui konferensi pers dimana ia menyebutkan:

“There will be great cooperation between Turkey, Tunisia, and Algeria, and we will be in one alliance and this will serve our people, our security the stability in the region.”

Lalu diikuti oleh rapat pengesahan mosi untuk pembentukan UU oleh Parlemen dan Pemerintah Turki. Pada 5 Januari 2020, Turki mengirimkan bantuan militernya kepada GNA Libya. Hingga 31 Maret 2020 dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Maret 2020, tercatat setidaknya 131 rakyat sipil yang menjadi korban dengan 64 orang meninggal dunia dan 67 orang lainnya meninggal dunia. (UNSMIL, 2020) Secara keseluruhan, menurut WHO, dari 2014 hingga Juni 2020 lebih dari 2.280 orang meninggal dunia dimana 458 diantaranya adalah korban sipil dan sekitar 146.000 rakyat Libya mengungsi keluar dari negaranya. (Libyan warlord Haftar Leaves Moscow Without Signing Ceasefire Deal)

Pada 23 Oktober 2020, dengan bantuan mediasi dari *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL) dan *Libyan Political Dialogue Forum* (LPDF), faksi-faksi yang berperang di Libya sepakat untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata permanen, namun tetap membutuhkan kesepakatan lebih lanjut di antara

berbagai pihak yang terlibat konflik dan semua pejuang asing harus keluar dari Libya dalam waktu tiga bulan. (*Warring Libya Rivals Sign Truce but Tough Political Talks*)

Intervensi Turki ke Libya

Intervensi militer yang dilakukan Turki ke Libya didasari oleh permintaan resmi dari Pemerintah GNA Libya dan MoU yang diratifikasi oleh kedua negara pada 27 November 2019. Dalam kesepakatan yang berjudul *Memorandum of Understanding between The Government of Republic Turkey dan Government of General National Accord - State of Libya on Security and Military Cooperation* terdapat poin yang menjelaskan bahwa Turki dan Libya dapat melakukan latihan bersama, konsultasi, transfer pengalaman, perencanaan dan bantuan material, juga membentuk komite bersama dalam kerjasama pertahanan dan keamanan, yang berbunyi:

“Provision of training, consultancy, experience transfer, planning and material support by Turkey for the establishment of Quick Reaction Force covering the police and military responsibilities in Libya”

“If requested, establishing a joint Office of Defence and Security Cooperation in Turkey and Libya (with enough experts and personnel).”

Pada Juli 2020, Turki mengirimkan agen intelejen, penasihat lapangan yang memberikan pelatihan, dan dukungan operasional berupa dukungan udara, dan kapal angkatan laut ke kota Misrata. Turki mendatangkan 356 tentara bayaran dari Suriah, Tunisia, Mesir, dan Sudan diikuti dengan 126 pesawat tempur lainnya. Turki juga dilaporkan telah membawa 1.400 tentara bayaran dari Tunisia dan 13.000 pejuang dari Suriah. Pesawat penumpang Libya dan Turki juga telah mengangkut pesawat tempur Tunisia secara bertahap dari Turki ke kota Misrata.

September 2020, sekitar 18.000 pejuang Suriah telah dikirim ke Libya oleh Turki. Turki juga mengirimkan sejumlah asset yaitu perangkat penglihatan malam dan juga beberapa detektor ranjau dan bahan peledak kepada GNA Libya. (*Turkish Intelligence Agents Fighters Arrive in Libya*) Pada 25 Maret 2020, GNA Libya meluncurkan *Operation Peace Storm* sebagai upaya pertahanan diri terhadap pasukan LNA yang menyerang kota Tripoli yang tidak mengindahkan gencatan senjata yang terjadi. Dalam operasi ini Turki terlibat langsung dengan mengirimkan drone dan intelejen mereka. Seminggu kemudian, sebuah kapal Fregat Angkatan Laut Turki menembakkan rudal yang diarahkan kepada sebuah pesawat tak berawak milik LNA. (*Libya Turkey Warship Fires Missiles on Sites Controlled by Haftar Militias*)

Dengan dukungan Turki, pasukan GNA berhasil merebut kembali kota-kota pesisir seperti Sorman, Ajaylat, Zaltan, Sabratha dan berhasil kembali menggabungkan wilayah yang sebelumnya sempat dikuasai oleh LNA. Serangan Turki ini dilaporkan menimbulkan dampak yang besar bagi pasukan pemberontak

di daerah-daerah tersebut dan telah menghancurkan kendaraan-kendaraan militer milik Uni Emirat Arab yang disediakan untuk LNA.

Pada 6 Juni 2020, pasukan GNA dengan bantuan Turki berhasil mengalahkan pasukan Haftar dari keseluruhan kota Tripoli. Namun, pada akhir Juni 2020, Mesir sebagai pendukung Haftar memperingatkan Turki dan GNA tentang intervensi militernya, dan menyebut hal ini sebagai deklarasi perang. Turki juga terlibat dalam bentrokan yang terjadi di Libya tengah yang dikenal dengan *Operation Paths to Victory*, dimana operasi ini dilancarkan oleh pihak GNA untuk mengambil alih kota Sirte dan Bandara Al Jufra.

Operasi ini dimulai pada 6 Juni 2020. Turki mengirimkan drone tempur di daerah Wadi al-Jarf, namun usaha tersebut gagal karena pasukan LNA berhasil memukul mundur pasukan GNA dan menewaskan sejumlah tentara Turki. Menanggapi kekalahan GNA dan Turki dalam pertempuran tersebut, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan kepala staf militer, Yasar Guler melakukan kunjungan mendadak ke Tripoli dan kembali membahas kerjasama militer antara kedua belah pihak.

Pada 23 Oktober 2020, kedua pihak yang berperang memutuskan untuk gencatan senjata. Hal ini disampaikan oleh perwakilan GNA Libya dan memberikan harapan untuk dapat meredakan konflik yang telah terjadi sejak tahun 2011 lalu, menyusul seruan pihak internasional untuk dapat segera melakukan gencatan senjata dikarenakan pandemic Covid-19.

Kepentingan Turki dalam Intervensi Militer di Libya

Kepentingan dalam mengimplementasikan *Blue Homeland Doctrine*

Sejak adanya Perjanjian Sevres pada tahun 1920, Turki mengalami pembatasan ketat pada daerah laut Aegea sampai laut Mediterania. Perjanjian Sevres ialah perjanjian damai setelah Perang Dunia I, yang terjadi antara sekutu dengan Turki Utsmani. Perjanjian ini terjadi setelah kekalahan Turki Utsmani dan terpaksa menandatangani Perjanjian Sevres pada tanggal 10 Agustus 1920 yang diselenggarakan di kota Sevres, Perancis. Perjanjian Sevres berisi bahwa Turki melepaskan wilayah yang sempat dikuasainya seperti Arab, Libya, Mesir, Irak, Syria, dan Lebanon.

Pada awal tahun 2000-an, Turki secara bertahap telah membangun kebijakan luar negeri dan keamanan baru. Aktor-aktor politik Turki memperkenalkan doktrin keamanan baru bernama *Mavi Vatan* atau Tanah Air Biru. Pertama kali diungkapkan dalam symposium “Laut Hitam dan Keamanan Laut” oleh Laksamana Gem Gurdeniz pada tanggal 14 Juni 2006, yang ditafsirkan sebagai upaya untuk membangun supremasi angkatan laut Turki di Mediterania Timur dan Laut Aegea. Kemudian doktrin tersebut dilanjutkan dan disempurnakan oleh Laksamana Cihat Yayci dengan membuat gambaran batas perairan teritorial, landas kontinen, dan

zona ekonomi eksklusif Turki di laut hitam, laut Marmara, laut Aegea, dan Mediterania seluas 462.000 km². (*Blue Homeland Talk Greece*)

Blue Homeland Doctrine adalah sebuah doktrin ekspansionis dari Angkatan Laut Turki yang memiliki tujuan untuk dapat menguasai wilayah territorial yang lebih banyak dan juga upaya untuk membangun supremasi Angkatan Laut Turki di Mediterania Timur dan Laut Aegea. Tujuan dari doktrin ini, selain untuk menggambarkan wilayah perairan Turki, juga untuk mengetahui strategi Turki di wilayah laut dan mengembangkan industri militer yang kompleks. Filosofi *Blue Homeland* ini mendukung pencarian cadangan gas Turki di seluruh wilayah Mediterania. Dengan doktrin ini, Turki mengklaim yurisdiksi maritime di 89.000 km² di laut Aegea dan 189.000 km² di laut Mediterania.

Pada tahun 2020, Angkatan laut Turki melakukan latihan bersama di laut mediterania yang diikuti oleh 103 kapal, latihan tersebut diberi nama "*blue homeland*". Tiga bulan kemudian Latihan tersebut kembali diadakan dan diikuti oleh 131 kapal, Latihan ini menjadi latihan terbesar dalam sejarah Turki. Turki juga telah mempercepat proyek kapal nasional, kapal selam kelas Reis dan Fregat kelas Istanbul, kapal pendarat Amfibi multiguna pertama Turki, TGC Anatolia, mulai dibangun. Tujuan dari dibuatnya kapal-kapal tersebut untuk menerapkan *blue homeland doctrine* demi menjaga wilayah-wilayah yang dimiliki oleh Turki. Latihan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menampilkan kemampuan angkatan laut Turki, tetapi juga untuk menyampaikan pesan militer mereka kepada negara-negara yang mengklaim hak atas tumpang tindihnya zona ekonomi eksklusif pada eksplorasi energi di mediterania timur. Juga dapat dilihat, bahwa kerjasama maritim antara Pemerintah Turki dan GNA Libya merupakan produk dari *blue homeland doctrine*. (*Turkey's Blue Homeland Doctrine and Agreement with Libya*)

Upaya memberikan dukungan kepada Pemerintah GNA Libya menjadi permulaan *Blue Homeland Doctrine*. Presiden Erdogan mengatakan kesepakatan maritim Ankara dengan GNA Libya telah membalikan kesepakatan Sevres dengan mengubah tatanan regional. Perjanjian maritim yang disepakati antara Turki dengan GNA Libya membuat Turki mewujudkan ambisi maritimnya. Dengan ditandatanganinya MoU antara Turki dan GNA Libya untuk meningkatkan perdagangan, pelaksanaan proyek pembangunan dan hubungan ekonomi menjadi salah satu alasan bagi Turki menggunakan jalur laut Mediterania untuk mengirimkan pasokan barang-barang yang diperlukan untuk proyek pembangunan di Libya sekaligus menggunakan *blue homeland doctrine* di laut Mediterania.

Kepentingan Turki dalam Sektor Sumber Daya Alam

Dengan banyaknya penemuan gas bumi di kawasan Mediterania Timur, menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu fokus kerjasama maupun persaingan di kawasan. Cadangan gas lepas pantai yang signifikan berdampak besar pada agenda keamanan energi regional. Cadangan gas yang baru ditemukan telah menjanjikan swasembada bagi negara-negara di kawasan serta prospek untuk terlibat dalam bisnis ekspor gas yang menguntungkan.

Penemuan cadangan gas yang besar di Mediterania timur telah mengubah keseimbangan energi di wilayah tersebut. Dari total cadangan yang diperkirakan sebesar 125 tcf (*trillion cubic feet*), pangsa Siprus mencapai 20 tcf, angka yang dapat mengubah nasib pulau itu. Cadangan Israel kira-kira dua kali lebih banyak dan merupakan sumber untuk sebagian besar produksi listrik domestik negara itu. Ekspor gas dari ladang Leviathan Israel dimulai pada Januari 2020, dan sudah memasok ke Mesir dan Yordania. Cadangan Mesir bahkan lebih besar, berkat ladang Zohr yang sangat besar (diperkirakan 21-30 tcf). Selanjutnya, Mesir berupaya menjadi pusat perdagangan energi regional dengan mencairkan gas dan mengeksportnya kembali melalui terminal LNG di Idku, sebelah timur Alexandria, dan SEGAS terminal di Damietta. (Branislav Stanicek, 2020)

Secara geopolitik, kekuatan Turki dalam peta politik di daerah Mediterania Timur sangat terbatas karena di kelilingi oleh negara-negara yang berlawanan dengan Turki. Uni Emirat Arab, Mesir, Israel, Yunani, dan Siprus adalah beberapa negara Mediterania Timur yang berposisi dengan Turki. Untuk dapat semakin menekan pengaruh Turki di mediterania timur, Mesir memelopori pembentukan *East Mediterranean Gas Forum* (EMGF) yang beranggotakan Siprus, Yunani, Israel, Italia, Mesir, dan otoritas Palestina yang bertujuan untuk mengkoordinasi kebijakan energi dan membuat jalur pipa gas bawah laut menuju eropa, namun dalam forum tersebut tidak mengikutsertakan Turki sebagai anggotanya. Dengan adanya forum regional ini, menunjukkan bahwa Turki sedang dasingkan dari proses pengembangan sumber daya energi di Mediterania Timur. (Gokhan Tekir, 2020)

Karena terisolasi di kawasan mediterania timur, dalam menjalankan kepentingan nasionalnya, terutama dalam bidang *military security* dan *territory integrity*, Turki yang berorientasi pada *Blue Homeland Doctrine*, mengambil tindakan berani dengan melakukan kerjasama maritim dengan Pemerintah GNA Libya untuk dapat mengamankan zona ekonomi eksklusif diantara mereka. Dengan timbal balik Turki menjamin eksistensi dan membantu pasukan militer GNA Libya sebagai pemerintah resmi Libya dalam melawan kelompok pemberontak LNA.

Dengan kekuatan politiknya, Turki dapat mempengaruhi Libya untuk dapat menyepakati batas maritim antara kedua negara yang tentunya sangat menguntungkan bagi Turki. Selain akses Libya yang berbatasan langsung dengan laut mediterania dan juga wilayah yang kaya akan sumber daya energi. Libya memiliki cadangan minyak yang terbesar di benua Afrika, dengan perkiraan cadangan 48.4 Miliar barel, dan peringkat ke delapan terbesar di Dunia. Kendali atas minyak telah menjadi sebab konflik yang terjadi di Libya. Minat Turki atas kekayaan Sumber Daya Alam di Libya adalah alasan untuk mengintervensi di Negara Libya dan mendukung GNA. GNA tidak dapat menolak persyaratan atau penawaran Turki karena dukungan militer dan politik yang telah diberikan oleh Turki dalam upaya untuk mengalahkan pasukan LNA dan menjadikan GNA Libya satu-satunya Pemerintahan yang berkuasa di Libya.

Dalam MoU kerjasama maritim yang ditandatangani oleh Pemerintah Turki dan Libya terdapat poin yang mengatakan bahwa kedua pihak tersebut dapat mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif pihak Turki maupun pihak GNA Libya. Pernyataan tersebut terdapat pada Artikel IV poin 2 dalam MoU kerjasama maritim antara Turki dan GNA Libya, yang berbunyi:

“In case there are natural resources extending from the Economic Exclusive Zone of one party to the Exclusive Economic Zone of the other, the two parties could cooperate in order to reach an agreement on the modalities of the exploration of such resources.”

Dari poin diatas, dapat dilihat bahwa Turki memanfaatkan perjanjian tersebut untuk mengeksplotasi sumber daya alam yang dimiliki oleh GNA Libya berupa gas alam untuk kepentingan internal Turki.

Berdasarkan gambaran diatas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi mengapa Turki mengintervensi perang saudara yang terjadi di Libya adalah karena alasan geopolitik dimana jika Pemerintah GNA Libya berhasil digugurkan. Di sisi lain, kawasan Mediterania Timur yang kaya akan sumber daya energi menjadi salah satu pusat energi terbesar di dunia menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu perhatian Turki guna mengamankan akses mereka untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya energi yang tersedia di kawasan tersebut.

Kepentingan Ekonomi Turki

Ekonomi adalah salah satu kepentingan yang mendasar bagi suatu negara selain kepentingan keamanan dan politiknya. Kepentingan ekonomi ini dapat berupa produksi, bahan baku, perdagangan, serta minyak, gas, dan energi. Kepentingan ekonomi juga menjadi sebuah kepentingan nasional yang turut diperjuangkan dalam intervensi negara terhadap negara lain. Turki merupakan salah satu negara Kawasan Mediterania Timur yang memiliki kepentingan ekonomi berupa kerja sama perdagangan dengan Libya maupun eksplorasi energi di kawasan mediterania timur.

Dengan situasi geopolitik Turki yang unik dan melihat dari fakta bahwa Turki kekurangan akan cadangan hidrokarbon, sedangkan negara-negara tetangganya memiliki cadangan energi yang melimpah ini memberi keharusan bagi Turki untuk mengejar hubungan energi yang stabil dengan negara atau wilayah yang kaya akan energi di dekatnya. Hal ini sejalan dengan permintaan energi domestik Turki yang terus meningkat. Pengejaran hidrokarbon, terutama gas alam, menjadi tujuan utama geopolitik dan geoekonomi Turki.

Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan domestik Turki akan energi, dan juga dengan banyaknya penemuan sumber energi di kawasan mediterania timur menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu tujuan Turki

dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi guna memenuhi permintaan domestiknya. Motivasi di balik kebijakan terkait gas alam Turki adalah pertama, menjadi negara yang bergantung pada ekspor, tujuan utama Turki adalah mengamankan aksesnya ke pasokan gas alam untuk memenuhi permintaan domestiknya, kedua, untuk mendiversifikasi struktur pasokan yang ada dan mengimbangi peran dominan Rusia dalam portofolio energinya, ketiga, untuk memperkuat atau meningkatkan keterkaitannya dalam arsitektur keamanan regional dengan memajukan perannya sebagai negara transit energi, dan hub utama potensial untuk pasokan menuju Eropa. (Ahmed S. Yayla, 2020)

Manfaat ekonomi juga termasuk minyak dan gas, dengan mengklaim wilayah ZEE yang lebih besar di Mediterania. Hal ini dapat mengganggu pasokan ekspor minyak *EastMed* yang dilakukan oleh negara anggota EMGF. Dengan hal ini juga dapat mempermudah akses *TurkStream* (sebuah jalur pipa bawah tanah dari Rusia menuju Turki) yang dilakukan Turki bersama Rusia guna mengirimkan pasokan minyak dari Rusia ke negara-negara di Eropa. Secara teoritis Turki mendapatkan akses ke cadangan gas besar di lepas pantai selatan Siprus melalui kesepakatan Turki- GNA Libya.

Terdapat kepentingan-kepentingan dari kerjasama yang dilakukan oleh Turki dan GNA Libya. Minimnya tindakan dari Negara-negara Eropa untuk mendukung GNA Libya memudahkan Turki melakukan intervensi. bagi Turki, tujuan intervensi tersebut untuk mendapatkan kepentingannya berupa faktor ekonomi, politik, dan ideologis yang mendorong tindakan Turki di Libya. Sedangkan kepentingan dari GNA Libya untuk mendapatkan dukungan menjadi Pemerintahan yang sah dan diakui oleh Dunia Internasional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha Turki melalui dua buah kesepakatan bersama dengan GNA Libya menunjukkan adanya motif geopolitik. Hal ini dapat digambarkan dengan adanya MoU yang disepakati tentang perbatasan ZEE di antara kedua negara tersebut, yang bertujuan untuk dapat memberikan dampak kepada negara-negara kawasan Mediterania yang telah mengisolasi Turki dari struktur kerjasama energi regional kawasan. Jika dilihat dari segi ekonomi, kawasan Mediterania yang kaya akan sumber daya energi menjadi suatu tujuan utama Turki dalam memenuhi kebutuhan energi domestik mereka, juga untuk membuat Turki sendiri menjadi negara yang mandiri akan kebutuhan energi yang akan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan Turki dalam mengintervensi Libya yang sedang mengalami perang saudara ialah karena adanya kepentingan Turki dalam melaksanakan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, Pemerintah Turki menyetujui dua buah perjanjian dengan GNA Libya yaitu perjanjian tentang kerjasama militer dan kerjasama tentang pembagian zona ekonomi eksklusif dan pembagian batas demarkasi laut antar kedua negara tersebut. Pemerintah Turki

mengambil langkah tegas dengan mendukung pemerintahan resmi GNA Libya yang diakui oleh PBB dalam menekan gerakan kelompok LNA yang ingin mengukudeta pemerintahan GNA Libya. Adapun alasan yang melatarbelakanginya adalah eksistensi GNA Libya yang terancam, dan jika GNA Libya berhasil dijatuhkan, maka Turki akan kehilangan salah satu sekutu terbesarnya di daerah mediterania. Terlebih dengan adanya *blue homeland doctrine* yang menjadi salah satu agenda Partai AK pimpinan Erdogan dalam melaksanakan politik luar negerinya.

Dalam sektor sumber daya alam, wilayah Mediterania Timur yang kaya akan energi hidrokarbon menjadi salah satu fokus Turki dalam mengeksplorasi cadangan gas yang tersedia disana dengan cara melakukan perjanjian kerjasama maritim dengan GNA Libya guna mendapatkan hak eksplorasi yang lebih luas di Mediterania Timur.

Disisi lain, posisi geopolitis Turki di kawasan Mediterania tidak dalam keadaan yang baik, karena adanya pemebentukan EMGF yang diinisiasi oleh Mesir untuk mengkoordinasikan kebijakan energi dan membuat jalur pipa gas bawah laut menuju ke eropa, namun forum tersebut tidak mengikutsertakan Turki dalam keanggotaannya. Dengan adanya kesepakatan dengan GNA Libya, maka Turki bertujuan untuk melindungi hak maritimnya dan untuk memberi peringatan kepada negara-negara anggota EMGF karena tidak mengikutsertakan Turki dalam forum tersebut (*territory integrity dan military security*).

Dalam segi ekonomi, kawasan Mediterania Timur menjadi salah satu pusat eksplorasi minyak terbesar dengan banyaknya ditemukan ladang gas menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu fokus Turki dalam menjalankan kepentingannya ekonominya (*economic well being*). Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan akan sumber daya energi dalam negeri Turki, hal tersebut mengharuskan Turki untuk segera membangun hubungan perdagangan dengan negara-negara sekitar, terlebih karena posisi geopolitis Turki yang kurang memadai di kawasan Mediterania.

Daftar Pustaka

(n.d.). Retrieved July 01, 2020, from *Libya Proactive Loacl Leaders*:

<http://www.libya-analysis.com/libyan-elections>

(n.d.). Retrieved February 01, 2020, from Perang Sipil Libya, Pasukan jenderal Haftar Rebut Kamp Militer:

<https://dunia.tempo.co/read/1193587/perang-sipil-libya-pasukan-jenderal-haftar-rebut-kamp-militer/full&view=ok>

(n.d.). Retrieved February 06, 2021, from *Libya Makes dormal request for Turkish Military Support*:

<https://www.trtworld.com/turkey/libya-makes-formal-request-for-turkish-military-support-official-says-32499>

(n.d.). Retrieved July, 01, 2020, from *Peace Storm: Turkey's tries to turn the table in Libya:*

<https://ahvalnews.com/libya/peace-storm-turkey-tries-turn-tables-libya>

(n.d.). Retrieved February 08, 2021, from *214 Deaths and 981 Injuries in Recent Clashes up to 30 July min of Health:*

<https://www.libyaherald.com/2014/08/01/214-deaths-and-981-injuries-in-recent-clashes-up-to-30-july-min-of-health/#ixzz399gS1xyr>

(n.d.). Retrieved February 08, 2021, from *Haftar Launches Attack on Islamist:*

<https://www.libyaherald.com/2014/05/16/hafter-launches-benghazi-attack-on-islamists/#axzz31uF72T00>

(n.d.). Retrieved February 09, 2021, from *Warlord Khalifa Haftar Threatens Claims Presidency if Elections Fails:*

<https://www.libyaobserver.ly/news/warlord-khalifa-haftar-threatens-claim-presidency-if-elections-fail>

(n.d.). Retrieved February 10 2021, from *National Accord Government Regains Controls of Four Sites in Tripoli, Haftar Promises Surprise*

<https://www.middleeastmonitor.com/20190411-national-accord-government-regains-control-of-four-sites-in-tripoli-haftar-promises-surprise/>

(n.d.). Retrieved June 09. 2021, from *Libyan Warlord Haftar Leaves Moscow without Signing Ceasefire Deal*

<https://www.theguardian.com/world/2020/jan/14/libyan-warlord-haftar-leaves-moscow-without-signing-ceasefire-deal>,

(n.d.). Retrieved June 10, 2021 from *Warring Libya Rivals Sign Truce vut Tough political Talks ahead:*

<https://www.reuters.com/article/us-libya-security-ceasefire/warring-libya-rivals-sign-truce-but-tough-political-talks-ahead-idUSKBN2781BD?il=0>

(n.d.). Retrieved March 01, 2020 from *Turkish Intellegence Agents Fighters Arrive in Libya:*

<https://english.alarabiya.net/News/north-africa/2020/01/06/Turkish-intelligence-agents-foreign-fighters-arrive-in-Libya-Sources>

(n.d.). Retrieved February 12, 2021 from *Libya Turkey Warship Fires Missiles on Sites Controlled by Haftar Militias*:

<https://www.middleeastmonitor.com/20200401-libya-turkey-warship-fires-missiles-on-sites-controlled-by-haftar-militias/>

(n.d.). Retrieved March 02, 2021 from *Blue Homeland Talk Greece*:

<https://greekcitytimes.com/2021/01/13/blue-homeland-talk-greece/>

(n.d.). Retrieved March 25, 2021 from *Turkey's Blue Homeland Doctrine and Agreement with Libya*:

<https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/oe-watch-articles-2-singular-format/353205>